

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.LATAR BELAKANG PENELITIAN**

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Kepadatan penduduk di Indonesia merupakan salah satu persoalan penting karena hal tersebut akan sangat berdampak besar pada kemajuan suatu negara. Kepadatan penduduk suatu wilayah akan memberikan banyak dampak negatif yang berpengaruh pada berbagai aspek di kehidupan bermasyarakat. Salah satu masalah akibat kepadatan penduduk adalah kemiskinan.

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki sebagian masyarakat ekonomi rendah. Kemiskinan sering dimaknai dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, pakayan, papan, pendidikan dan kesehatan.

Menurut Soekanto ( 2010 : 320) kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tertentu.

Kemiskinan terjadi disebabkan karena beberapa faktor. Adapun beberapa faktornya yaitu kurangnya lapangan pekerjaan yang layak dengan

penghasilan yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dan sumber daya manusia yang masih kurang. Kondisi atau masalah yang seringkali muncul akibat dari kemiskinan adalah kriminalitas yang tinggi, tingkat pendidikan yang rendah, tingkat kesehatan masyarakat yang rendah dan juga sumber daya manusia yang rendah. Kondisi-kondisi seperti ini akan sangat berdampak buruk pada pertumbuhan suatu negara.

Menurut Badan Pusat Statistik ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)) Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)) jumlah penduduk miskin dari tahun 2019 mengalami peningkatan di tahun 2020. Jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, naik 1,13 juta orang terhadap Maret 2020 dan naik 2,76 juta orang terhadap September 2019. Dan persentase penduduk miskin pada September 2020 sebesar 10,19 persen, naik 0,41 persen poin terhadap Maret 2020 dan naik 0,97 poin terhadap September 2019. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2019 sebesar 6,56 persen, naik menjadi 7,38 persen pada Maret 2020. Sementara persentase penduduk miskin di daerah

pedesaan pada September 2019 sebesar 12,60 persen, naik menjadi 12,82 persen pada Maret 2020. Dibanding September 2019, jumlah penduduk miskin Maret 2020 di daerah perkotaan naik sebanyak 1,3 juta orang (dari 9,86 juta orang pada September 2019 menjadi 11,16 juta orang pada Maret 2020). Sementara itu, daerah pedesaan naik sebanyak 333,9 ribu orang (dari 14,93 juta orang pada September 2019 menjadi 15,26 juta orang pada Maret 2020). Pada Maret 2020, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,66 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.118.678,-/rumah tangga miskin/bulan. Dan Badan pusat statistic mencatat bahwa provinsi jawa timur mengalami peningkatan penduduk miskin yang sebelumnya pada tahun 2019 persentase penduduk miskin nya 10,20 persen meningkat di tahun 2020 menjadi 11,46 persen.

Dilihat dari permasalahan kemiskinan yang melanda masyarakat Indonesia, pemerintah telah mengambil tindakan dalam menanggulangi permasalahan ini. Dilihat dari Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, pemerintah telah mengeluarkan salah satu program yang telah terbukti dalam menanggulangi masalah kemiskinan.

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Program Keluarga Harapan (PKH) ini sudah ada sejak tahun 2007. Program Perlindungan Sosial

yang juga dikenal didunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers (CCT)* yang sudah terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi masalah kemiskinan yang dihadapi di beberapa negara terutama masalah kemiskinan kronis.

Salah satu program bantuan sosial yang bersyarat, Program Keluarga Harapan (PKH) ini menyediakan jaminan kesehatan untuk ibu hamil dan anak balita dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, selain itu mendapatkan pelayanan pendidikan bagi anak sekolah SD, SMP dan SMA yang layak dan juga memberi perhatian khusus pada penyandang disabilitas dan lanjut usia.

Program Keluarga Harapan ini diarahkan untuk menjadi Program yang mampu menanggulangi kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional. PKH ini memiliki tujuan untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.

Dalam pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) terdapat aktor penting dalam penyuksesan program PKH. Pendamping PKH adalah aktor yang berperan sangat penting dalam pengimplementasian program keluarga harapan (PKH). Menurut Direktur Jaminan Sosial (2015) Pendamping PKH adalah warga negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi tertentu dan lulus tes seleksi serta ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial, Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI untuk melakukan pendampingan kepada Peserta PKH berdasarkan kontrak kerja

dalam kurun waktu tertentu. Pendamping PKH adalah pihak kunci dalam menjembatani masyarakat dengan pemerintah baik pusat maupun daerah.

Tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) adalah mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan, meningkatkan taraf hidup KPM, Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian. Dalam mewujudkan tujuan PKH ini, pendamping PKH mengambil peran dan fungsi sebagai fasilitator, mediator, advocator, reduktor dan motivator. Adapun tugas dari pendamping PKH itu sendiri adalah sebagai Pendamping KPM dalam menjalankan menjalankan tugasnya dan juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat miskin dalam mewujudkan kesejahteraan hidup. Dan pendamping PKH menjadi tolak ukur dari kesuksesan PKH.

Desa Dalisodo adalah salah satu desa di kecamatan Wagir yang memiliki mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani. Desa Dalisodo juga sebagai salah satu desa yang sudah menjalankan PKH sejak tahun 2013. Kondisi masyarakat Desa Dalisodo sendiri yaitu masih banyaknya masyarakat yang mengalami tingkat ekonomi yang sangat rendah. Masalah tingkat rendahnya ekonomi atau biasa disebut kemiskinan ini disebabkan karena kurangnya lapangan di desa Dalisodo sendiri sehingga masyarakat sangat sulit mendapatkan pengahisaln dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Selain masalah kemiskinan yang melanda di desa Dalisodo, masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang Program Keluarga Harapan (PKH)

sehingga seringkali menimbulkan masalah kecemburuan sosial antara masyarakat, masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam cara mengelola uang bantuan PKH itu sendiri, masih rendahnya kemampuan masyarakat dalam menggali dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri, dan masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam merubah dan meningkatkan kemampuan kemampuan dan kondisi ekonomi. Dari beberapa permasalahan ini tidak bisa terlepas dari peran pendamping PKH yang menjalankan tugasnya sebagai pelaksana PKH dalam mencapai tujuan yaitu mengurangi angka kemiskinan dalam masyarakat.

Dilihat dari latar belakang dan permasalahan diatas maka saya tertarik mengangkat judul “Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Dalisodo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang”.

## **1.2.RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka dapat dirumuskan permasalahan mengenai;

1. Bagaimana Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Dalisodo, Kec: Wagir, Keb: Malang?
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat Peran Pendamping dalam Pemberdayaan masyarakat miskin melalui Program Keluarga Harapan?

### **1.3.TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini yaitu;

1. Untuk mendeskripsikan peran pendamping dalam pemberdayaan masyarakat miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Dalisodo, Kec: Wagir, Keb: Malang.
2. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat peran pendamping dalam pemberdayaan masyarakat miskin melalui Program Keluarga Harapan.

### **1.4. MANFAAT PENELITIAN**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya di bidang pendidikan nonformal tentang peran pendamping dalam pemberdayaan masyarakat miskin melalui program keluarga harapan (PKH) di desa Dalisoso.

2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi masyarakat dapat mengetahui Program Keluarga Harapan (PKH) salah satu program dapat mengatasi kemiskinan.
- 2) Bagi pemerintah dapat mengetahui bahwa Pendamping PKH berperan penting dalam penyuksesan Program Keluarga Harapan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.